

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator utama dalam perekonomian Indonesia adalah inflasi, yaitu kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Inflasi memiliki keterkaitan yang erat dengan stabilitas harga serta kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tingkat inflasi yang terkendali mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu berbagai aktivitas ekonomi seperti konsumsi, investasi, serta produksi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi guna menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan, mengingat inflasi yang tidak terkendali berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi makroekonomi. Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, diperlukan kebijakan yang efektif dan terarah. Bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia secara implisit mulai menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

Inflation Targeting Framework (ITF) pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam kebijakan moneter di mana bank sentral secara terbuka menetapkan sasaran inflasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Kerangka ini lahir dari kebutuhan akan kebijakan moneter yang lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mengendalikan jumlah uang beredar secara langsung, ITF lebih bertumpu pada pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Logikanya, apabila

masyarakat dan pelaku usaha sudah memiliki keyakinan bahwa inflasi akan terjaga dalam kisaran yang wajar, maka perilaku ekonomi mereka pun akan lebih stabil, mulai dari keputusan dalam menetapkan harga, merencanakan investasi, hingga menentukan tingkat konsumsi. Dalam konteks inilah kredibilitas bank sentral menjadi sangat penting, karena efektivitas ITF sangat bergantung pada sejauh mana publik mempercayai komitmen bank sentral dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target inflasi tersebut, Bank Indonesia tidak bekerja melalui satu instrumen saja, melainkan melalui serangkaian mekanisme transmisi yang saling terhubung. Instrumen paling utama yang digunakan adalah BI Rate, yaitu suku bunga kebijakan yang menjadi sinyal arah kebijakan moneter kepada pasar. Ketika inflasi menunjukkan tendensi meningkat dan berisiko melewati batas target, Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate guna memperketat kondisi moneter, memperlambat laju kredit, dan meredam permintaan di dalam perekonomian. Sebaliknya, penurunan BI Rate ditempuh ketika perekonomian membutuhkan dorongan dan inflasi masih berada dalam batas yang aman. Perubahan BI Rate ini kemudian merambat ke berbagai sisi perekonomian melalui beberapa jalur. Pertama, melalui jalur nilai tukar, di mana perubahan suku bunga akan memengaruhi kurs rupiah terhadap dolar AS, dan pelemahan rupiah pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kedua, melalui jalur likuiditas, perubahan suku bunga berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan apabila pertumbuhan uang beredar terlalu cepat dibandingkan pertumbuhan output, tekanan harga pun akan meningkat. Ketiga, kondisi pasar uang antar bank (PUAB) turut mencerminkan seberapa sehat aliran likuiditas di sistem perbankan, yang berimplikasi pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Selain ketiga jalur tersebut, terdapat pula faktor di luar kendali kebijakan moneter domestik yang turut mewarnai pergerakan inflasi, yaitu harga minyak mentah dunia.

Fluktuasi harga minyak secara langsung memengaruhi biaya energi dan ongkos produksi berbagai sektor, sehingga kenaikannya berpotensi mendorong inflasi dari sisi penawaran. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan inflasi, terutama ketika ekspansi ekonomi yang pesat mendorong permintaan agregat melampaui kapasitas produksi yang tersedia. Dengan mempertimbangkan seluruh jalur transmisi tersebut, maka BI Rate, kurs, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel-variabel yang secara empiris merepresentasikan bekerjanya kerangka ITF dalam memengaruhi inflasi di Indonesia. Melalui kerangka ini, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Rohmah & Waluyo, 2024a).

Pergerakan inflasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa indikator makroekonomi seperti BI Rate, kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, kondisi pasar uang antar bank, serta pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan dinamika inflasi. Perubahan pada indikator-indikator tersebut dapat memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan harga barang dan jasa. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka ITF, BI Rate kebijakan memiliki peran signifikan dalam mengendalikan inflasi dalam jangka panjang, sedangkan variabel lain seperti kurs cenderung menunjukkan pengaruh yang lebih fluktuatif dalam jangka pendek (Rohmah & Waluyo, 2024)

BI Rate merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan untuk memengaruhi tingkat inflasi. Perubahan BI Rate akan berdampak pada biaya pinjaman, sehingga memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat. Kenaikan BI Rate

umumnya akan menekan aktivitas ekonomi, sedangkan penurunan BI Rate dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, pengaruh BI Rate terhadap inflasi tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui mekanisme transmisi yang membutuhkan waktu hingga berdampak pada sektor riil (Roeroe et al., 2020)

Selain BI Rate, kurs juga berperan penting dalam memengaruhi inflasi. Kurs mencerminkan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing dan berpengaruh terhadap harga barang impor. Pelemahan kurs rupiah dapat meningkatkan harga barang impor yang kemudian mendorong kenaikan harga di dalam negeri, sedangkan penguatan kurs dapat membantu menekan laju inflasi. Namun demikian, pengaruh kurs terhadap inflasi cenderung tidak stabil karena dipengaruhi oleh kondisi pasar global (Rohmah & Waluyo, 2024)

Jumlah uang beredar secara teoritis juga memiliki hubungan dengan inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa dapat menyebabkan kenaikan harga secara umum. Namun dalam praktiknya, sejak diterapkannya ITF, pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dalam jangka pendek cenderung tidak signifikan, meskipun dalam jangka panjang tetap berperan dalam menjaga stabilitas harga (Rohmah & Waluyo, 2024a).

Di sisi lain, harga minyak mentah dunia sebagai faktor eksternal turut memengaruhi tingkat inflasi. Minyak merupakan sumber energi utama dalam berbagai aktivitas ekonomi, sehingga kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, kondisi pasar uang antar bank juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam hal likuiditas perbankan. Likuiditas yang memadai akan mendorong penyaluran kredit secara optimal sehingga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan pergerakan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan inflasi melalui perubahan permintaan agregat. Inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis dan dapat berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi (Putra & Rahayuningsih, 2025; Sundoro et al., 2025a)

Selama periode 2005 hingga 2025, perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kurs, serta dampak pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Meskipun demikian, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia mampu mendorong proses pemulihan ekonomi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas inflasi serta indikator makroekonomi lainnya memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia (Inflasi et al., n.d.).

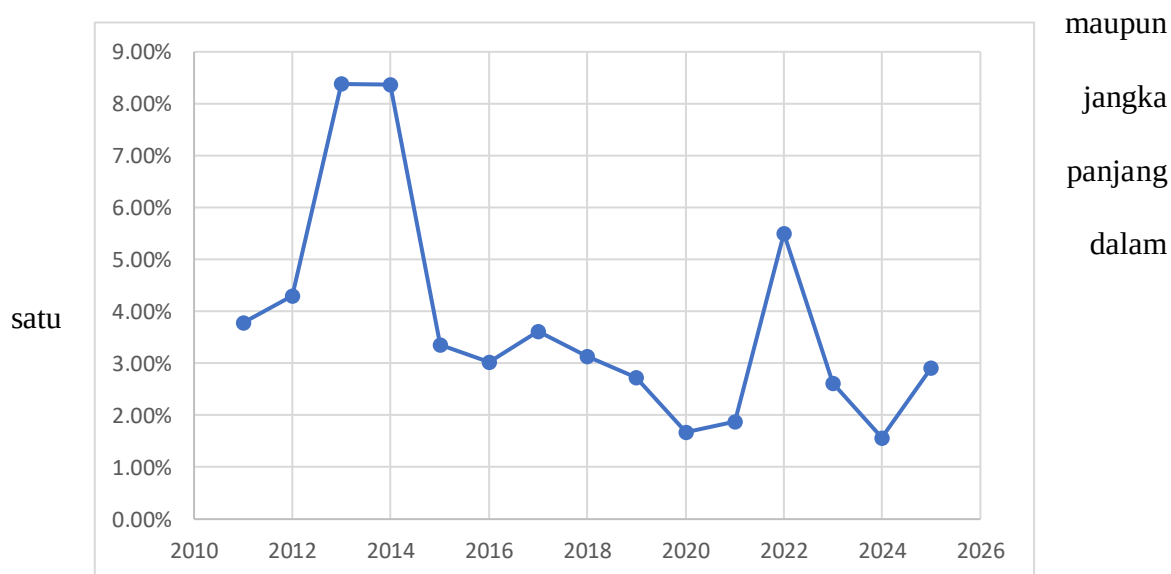
Meskipun kajian tentang inflasi sudah cukup banyak berkembang dalam literatur ekonomi, bila ditelaah lebih dalam, penelitian-penelitian yang ada masih menyisakan beberapa celah yang belum terjawab secara memadai. Dalam banyak studi terdahulu, variabel yang digunakan untuk menganalisis inflasi cenderung terbatas, hanya memasukkan satu atau dua indikator saja, sehingga dinamika inflasi yang sesungguhnya bersifat multidimensi justru tidak tertangkap secara utuh. Padahal pergerakan inflasi di dalam perekonomian tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai variabel yang bekerja secara bersamaan dan saling memengaruhi satu sama lain. Ketika hanya sebagian kecil dari variabel-variabel itu yang dimasukkan ke

dalam model, maka kesimpulan yang dihasilkan pun berpotensi menjadi tidak lengkap bahkan menyesatkan dari sisi kebijakan.

Selain soal kelengkapan variabel, dimensi waktu dalam analisis juga menjadi persoalan tersendiri. Banyak penelitian yang hanya mampu menjelaskan bagaimana suatu variabel memengaruhi inflasi dalam jangka pendek, tanpa menggali lebih jauh apakah hubungan tersebut juga bertahan dan membentuk keseimbangan dalam jangka panjang. Sementara itu, dalam konteks kebijakan moneter, justru pemahaman atas hubungan jangka panjang itulah yang paling dibutuhkan untuk menilai apakah suatu kebijakan memberikan dampak yang benar-benar struktural atau hanya bersifat temporer. Di atas semua itu, ada satu aspek yang luput dari perhatian sebagian besar penelitian terdahulu, yaitu tidak dikaitkannya variabel-variabel yang diteliti dengan kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) secara eksplisit. Hal ini menjadi kelemahan yang cukup mendasar, mengingat sejak ITF diterapkan di Indonesia, kebijakan moneter tidak lagi berjalan melalui satu instrumen tunggal, melainkan bekerja melalui mekanisme transmisi yang melibatkan banyak variabel sekaligus sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Mengkaji variabel-variabel tersebut secara terlepas dari konteks ITF berarti mengabaikan kerangka besar yang justru melatarbelakangi mengapa variabel-variabel itu relevan untuk diteliti. Ketiga persoalan inilah yang menjadi *research gap* sekaligus titik berangkat dari penelitian ini.

Berangkat dari celah-celah tersebut, penelitian ini hadir dengan sejumlah kebaruan yang secara substantif membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Dari sisi kelengkapan variabel, penelitian ini mengintegrasikan enam indikator makroekonomi sekaligus ke dalam satu model analisis yang utuh, yaitu BI Rate, kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memasukkan keenam variabel tersebut secara bersamaan, interaksi antar indikator dapat diamati secara menyeluruh tanpa harus mengorbankan salah satu dimensi analisis. Dari sisi pendekatan

metodologis, penelitian ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM), sebuah metode yang secara khusus mampu menangkap hubungan antarvariabel baik dalam jangka pendek



kerangka estimasi yang terpadu, berbeda dengan metode regresi konvensional maupun VAR yang banyak digunakan dalam penelitian sejenis namun tidak mampu mengakomodasi kedua dimensi waktu tersebut sekaligus. Yang paling membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya adalah keseluruhan analisis dilakukan secara eksplisit dalam bingkai *Inflation Targeting Framework* (ITF), sehingga keenam variabel tersebut tidak diperlakukan sebagai faktor-faktor yang berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari satu sistem transmisi kebijakan moneter yang saling terhubung dan bekerja bersama dalam upaya mencapai target inflasi. Dengan kerangka seperti ini, temuan penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi makro, tetapi juga menjadi masukan yang bermakna bagi perumusan kebijakan moneter yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber: (Bank Indonesia)

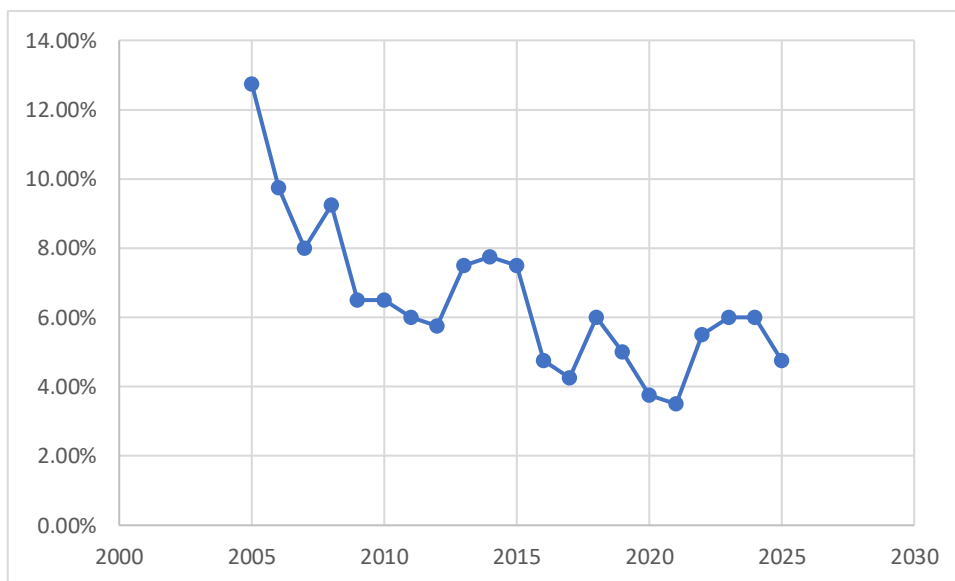
Gambar 1. 1 Kurva Inflasi di Indonesia Tahun 2005-2025

Gambar 1.1 menunjukkan perubahan inflasi Indonesia dari tahun 2005 hingga 2025. Berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi domestik dan global, perubahan harga energi,

tingkat permintaan masyarakat, dan kebijakan ekonomi dan otoritas moneter pemerintah, dapat memengaruhi tingkat inflasi. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2005 sebesar 17,11%, yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kenaikan harga berbagai barang dan jasa. Selain itu, karena tekanan harga dari faktor domestik dan eksternal, inflasi juga meningkat pesat pada tahun 2008 sebesar 11,06% dan pada tahun 2013 sebesar 8,38%.

Tetapi tingkat inflasi terendah sebesar 1,57% akan terjadi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa tekanan harga ekonomi masih terkendali. Dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan permintaan masyarakat, inflasi juga berada pada tingkat yang rendah sebesar 1,68% pada tahun 2020. Inflasi meningkat sebesar 5,51% pada tahun 2022, tetapi kembali turun menjadi 2,61% pada tahun 2023 dan 1,57% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih pada tingkat yang cukup stabil.

Secara keseluruhan, perubahan inflasi di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2025 menunjukkan bahwa stabilitas harga masih menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan moneter yang efektif. Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan kerangka kebijakan moneter yang dikenal sebagai Inflation Targeting Framework (ITF) untuk mencapai dan mempertahankan sasaran inflasi. Akibatnya, diperlukan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi kemampuan ITF untuk menjaga stabilitas inflasi di Indonesia.



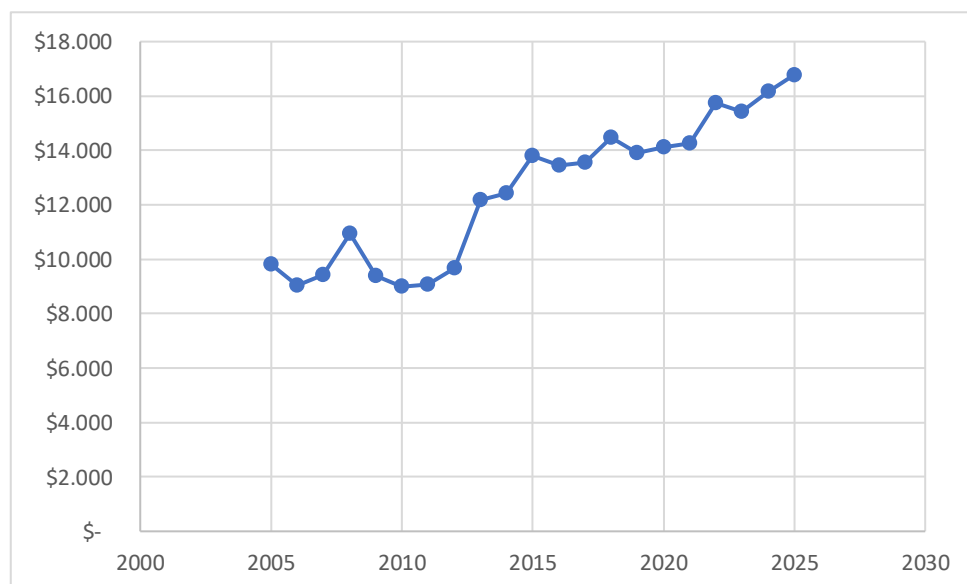
Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1. 2 Kurva BI Rate di Indonesia Tahun 2005-2025

Gambar 1.2 menunjukkan perubahan BI Rate di Indonesia dari 2005 hingga 2025. Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan moneter untuk memengaruhi tingkat suku bunga pasar dan menjaga stabilitas harga. Perubahan BI Rate dilakukan sebagai tanggapan terhadap berbagai kondisi ekonomi, terutama untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat BI Rate tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,75%. Tingkat suku bunga acuan yang tinggi pada tahun tersebut menunjukkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengatasi inflasi yang tinggi. Setelah itu, BI Rate secara bertahap menurun, tetapi masih mengalami fluktuasi sesuai dengan perubahan ekonomi di negara dan di seluruh dunia. Pada tahun 2013–2015, BI Rate naik lagi, mencapai titik tertinggi sebesar 7,75% pada 2014. Ini adalah tanggapan terhadap tekanan inflasi dan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, kebijakan moneter akomodatif digunakan untuk membantu pemulihan ekonomi setelah perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan ini mencakup penurunan suku bunga acuan sebesar 3,50% pada tahun 2021.

Selanjutnya, BI Rate naik lagi dari 2022 hingga 2024 sebagai akibat dari peningkatan tekanan inflasi dan penyesuaian kebijakan moneter global. Namun, pada tahun 2025, BI Rate turun menjadi 4,75%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perubahan BI Rate dari tahun 2005 hingga 2025 menunjukkan bahwa Bank Indonesia secara aktif mengubah suku bunga acuan sebagai bagian dari penerapan Framework Targeting Inflation (ITF). Perubahan suku bunga acuan ini mencerminkan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendukung kestabilan ekonomi nasional. n ekonomi setelah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.



Sumber: (Bank Indonesia)

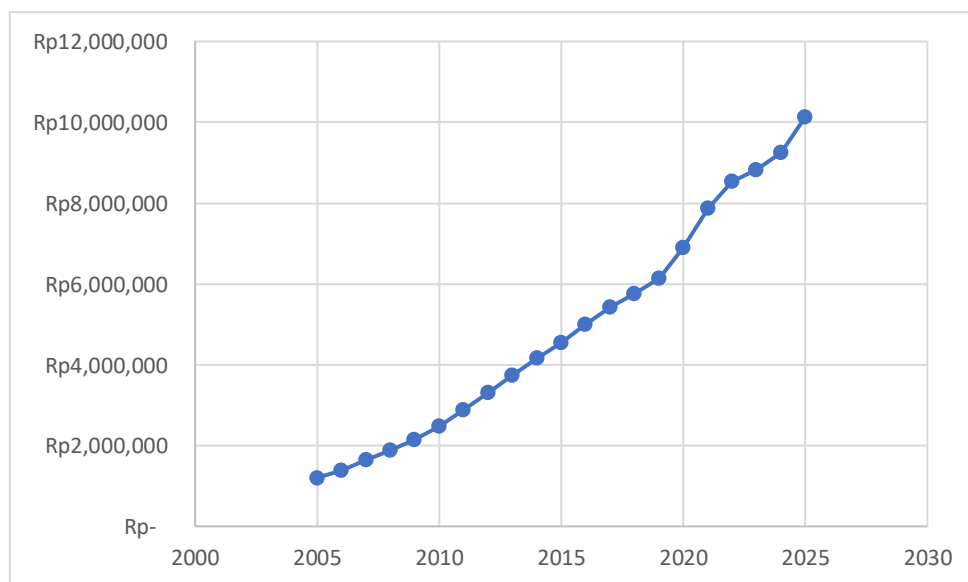
Gambar 1. 3 Kurva Kurs di Indonesia Tahun 2005-2025

Gambar 1.3 menunjukkan fluktuasi tahunan dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari tahun 2005 hingga 2025. Nilai tukar merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang paling penting karena dapat memengaruhi inflasi, perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Perubahan nilai tukar juga menunjukkan kondisi ekonomi inti di dalam negeri serta dampak dari dinamika ekonomi global (Laksono T.Y., 2017; Putra & Rahayuningsih, 2025). Data yang tersedia menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp8,99 per dolar AS, menunjukkan

bahwa rupiah relatif kuat dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, nilai tukar rupiah tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar Rp16,78 per dolar AS, menunjukkan bahwa nilai rupiah telah menurun sejak saat itu. Selain itu, nilai tukar juga menurun selama periode 2022–2024, tercatat sebesar Rp15,73, Rp15,42, dan Rp16,16 per dolar AS.

Secara umum, nilai tukar rupiah cenderung meningkat dari tahun 2005 hingga 2025. Kenaikan nilai tukar tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, rupiah akan mengalami depresiasi atau pelemahan terhadap dolar AS. Ada banyak variabel yang memengaruhi keadaan ekonomi global, pergeseran arus modal internasional, kebijakan moneter negara maju, dan keadaan ekonomi domestik. Stabilitas nilai tukar ditunjukkan oleh fluktuasi nilai tukar yang terjadi, yang menunjukkan bahwa kurs memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas harga. Ini karena perubahan kurs dapat memengaruhi tingkat inflasi melalui perubahan harga barang impor dan biaya produksi di dalam negeri.

Sumber: (Bank Indonesia)

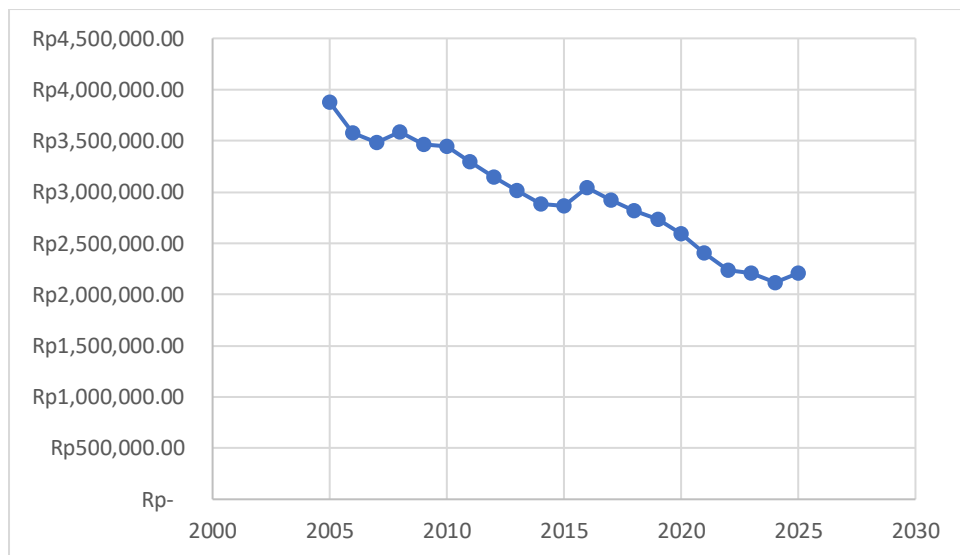


Gambar 1. 4 Kurva Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2005-2025

Berdasarkan Gambar 1.4 Jumlah Uang Beredar di Indonesia selama periode 2005–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator

moneter yang menunjukkan tingkat likuiditas dalam perekonomian adalah jumlah uang beredar. Perubahan dalam jumlah uang beredar dapat memengaruhi investasi, aktivitas ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, dan stabilitas harga dalam jangka panjang (Inflasi et al., n.d.). Berdasarkan data yang tersedia, jumlah uang beredar pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp1.203.215 miliar dan terus meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2010, jumlah uang beredar mencapai Rp2.471.205 miliar, dan pada tahun 2015, jumlah uang beredar meningkat menjadi Rp4.173.326 miliar. Tren ini terus meningkat hingga mencapai Rp7.870.452 miliar pada tahun 2021 dan sebesar Rp10.134.654 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi likuiditas yang terkait dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, kemajuan sektor keuangan, dan peran yang lebih besar yang dimainkan oleh perbankan dalam penyediaan dana kepada masyarakat.

Secara umum, dari tahun 2005 hingga 2025, jumlah uang beredar menunjukkan peningkatan yang konsisten tanpa penurunan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi, yang ditunjukkan oleh peningkatan transaksi masyarakat dan kebutuhan likuiditas ekonomi. Sebaliknya, jika pertumbuhan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa, tingkat inflasi juga dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam kerangka tujuan inflasi (ITF) adalah pengendalian jumlah uang beredar karena dapat memengaruhi stabilitas harga dan pencapaian sasaran inflasi Bank Indonesia.



Sumber:

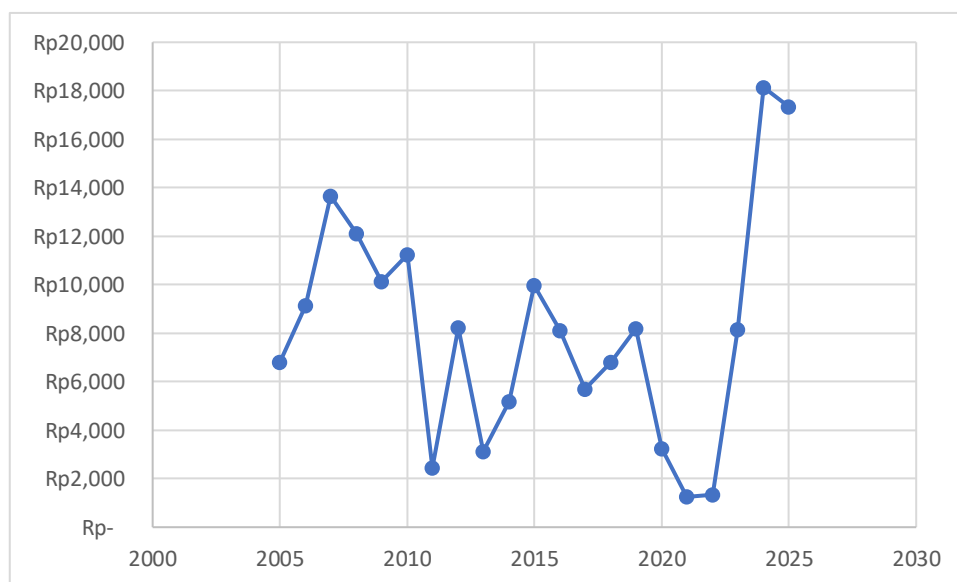
(Badan Pusat Statistik)

Gambar 1. 5 Kurva Minyak Mentah di Indonesia Tahun 2005-2025

Gambar 1.5 menunjukkan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia dari tahun ke tahun. Ini ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005 hingga 2025. Harga minyak mentah adalah salah satu indikator penting yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian nasional karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dalam negeri maupun internasional, seperti kondisi pasar energi global, perubahan dalam permintaan dan penawaran minyak di seluruh dunia, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor energi. Data yang tersedia menunjukkan bahwa harga minyak mentah mencapai titik tertingginya pada tahun 2005, saat itu sebesar Rp3.876.535,00. Setelah itu, harganya cenderung turun, tetapi sempat meningkat pada beberapa waktu, salah satunya pada tahun 2008, ketika harganya meningkat menjadi Rp3.587.187,00. Selain itu, harga minyak mentah melonjak menjadi Rp3.041.674,00 pada tahun 2016, naik dari level Rp2.868.142,00 pada tahun 2015. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam keadaan pasar energi yang berdampak pada harga minyak.

Selanjutnya, harga minyak mentah kembali menunjukkan tren penurunan, mencapai titik terendahnya pada tahun 2024 sebesar Rp2.117.562,00. Namun, pada tahun

2025, harga sedikit meningkat menjadi Rp2.208.250,00, tetapi masih jauh di bawah tingkat harga pada awal periode penelitian. Secara keseluruhan, pola fluktuasi harga minyak mentah menunjukkan kecenderungan menurun dalam jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa harga minyak mentah sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan di sektor energi serta dinamika pasar energi global. Perubahan harga minyak mentah adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam kerangka target inflasi (ITF) karena dapat memengaruhi inflasi melalui perubahan biaya produksi, biaya distribusi, dan harga barang dan jasa ekonomi.



Sumber: (Bank Indonesia)

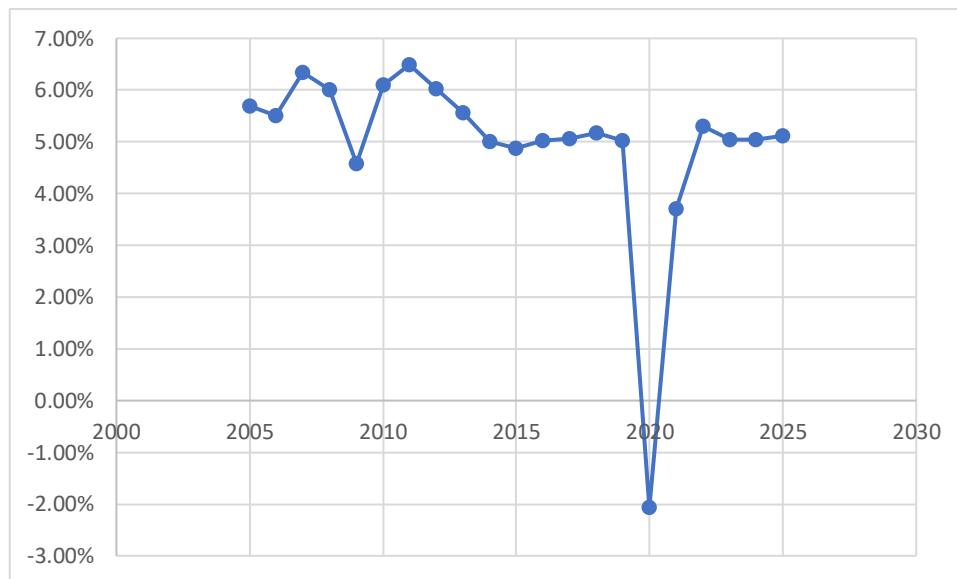
Gambar 1. 6 Kurva Pasar Uang Antar Bank Tahun 2005-2025

Berdasarkan Gambar 1.6 Pasar Uang Antar Bank (PUAB) adalah cara bagi perbankan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui transaksi pinjam-meminjam dana dalam jangka pendek, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6. Pergerakan PUAB menunjukkan likuiditas perbankan dan stabilitas industri keuangan secara keseluruhan. Akibatnya, PUAB menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi pasar keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Berdasarkan data yang tersedia, nilai PUAB bervariasi dari tahun ke tahun dari tahun 2005 hingga 2025. Nilai tertinggi

mencapai Rp18.140 pada tahun 2024, menunjukkan transaksi antar bank yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama periode tersebut. Tingginya aktivitas di pasar uang antar bank dapat menunjukkan bahwa perbankan sedang mencari lebih banyak dana jangka pendek sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi dan kemajuan di pasar keuangan. Sementara itu, nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp1.250, menunjukkan likuiditas perbankan yang longgar dan kemungkinan penurunan kebutuhan pinjaman antar bank.

Secara umum, pertumbuhan PUAB selama penelitian menunjukkan pola yang berfluktuasi tanpa kecenderungan yang konsisten untuk meningkat atau menurun. Nilai PUAB mengalami peningkatan yang cukup besar pada beberapa tahun, seperti pada tahun 2007 sebesar Rp13.644 dan tahun 2024 sebesar Rp18.140, tetapi juga mengalami penurunan yang cukup tajam pada beberapa tahun, seperti pada tahun 2011 sebesar Rp2.441 dan tahun 2021 sebesar Rp1.250. Kebijakan moneter Bank Indonesia, kondisi ekonomi makro, tingkat suku bunga, dan dinamika pasar keuangan adalah beberapa faktor yang sangat memengaruhi kondisi likuiditas perbankan, seperti yang ditunjukkan oleh fluktuasi tersebut.

Perkembangan PUAB adalah bagian penting dari jalur transmisi kebijakan moneter dalam Framework Targeting Inflation (ITF). Pergerakan PUAB menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung tercapainya sasaran inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian karena perubahan kondisi likuiditas perbankan dapat memengaruhi penyaluran kredit, jumlah uang beredar, dan pada akhirnya tingkat inflasi.



Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1. 7 Kurva Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2025

Berdasarkan Gambar 1.7, menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun dari 2005 hingga 2025. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi perekonomian dan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Desfitra et al., 2024). Jumlah data yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi mencapai 6,49% pada tahun 2011, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat selama periode tersebut, didukung oleh peningkatan investasi, konsumsi, dan produksi. Sementara itu, pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas ekonomi, mengurangi konsumsi masyarakat, dan mengurangi aktivitas investasi dan perdagangan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kontraksi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berada pada kisaran 5% selama periode 2005–2025. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan

kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 3,70% dan terus meningkat hingga mencapai 5,31% pada tahun 2022. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada periode 2023–2025, masing-masing 5,05%, 5,05%, dan 5,11%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kemam. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga terkait erat dalam kerangka target inflasi (ITF). Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat inflasi. Akibatnya, untuk menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia harus mengimbangi upaya pengendalian inflasi dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setelah membaca seluruh pesan, ada alasan yang kuat untuk melakukan penelitian ini. Stabilitas harga adalah salah satu syarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter Sasaran Inflasi (ITF), yang berfokus pada pencapaian dan pemeliharaan sasaran inflasi. Keberhasilan implementasi ITF tergantung pada berbagai indikator ekonomi makro yang merupakan bagian dari mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kemampuan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, memahami lebih lanjut tentang komponen yang memengaruhi efektivitas ITF sangat penting, baik untuk pengembangan penelitian akademik maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

Penelitian ini semakin penting karena perubahan ekonomi Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Selama periode ini, perekonomian Indonesia telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Ini termasuk perubahan harga minyak mentah di seluruh dunia, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, perubahan likuiditas perbankan yang ditunjukkan oleh Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Efektivitas ITF

dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi tersebut.

Meskipun Indonesia telah menggunakan Framework Targeting Inflation (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter sejak tahun 2005 dan secara umum mampu menjaga inflasi pada tingkat yang relatif terkendali, hubungan antara pelaksanaan ITF dan berbagai variabel ekonomi makro masih menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Baik pencapaian sasaran inflasi jangka pendek maupun jangka panjang dapat dipengaruhi oleh perubahan BI rate, nilai tukar, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, PUAB, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana variabel-variabel ini berdampak pada Framework Targeting Inflation (ITF) Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur ekonomi moneter dan membantu otoritas moneter meningkatkan kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan inflasi dan indikator makroekonomi dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang meliputi BI Rate, kurs, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2005–2025?
2. Bagaimana pengaruh BI Rate, kurs, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makroekonomi dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) secara parsial terhadap inflasi di Indonesia periode 2005–2025?
3. Bagaimana pengaruh BI Rate, kurs, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makroekonomi dalam

kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) secara simultan terhadap inflasi di Indonesia periode 2005–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perkembangan inflasi beserta indikator-indikator makroekonomi yang menjadi bagian dari kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF), yakni BI Rate, kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi, bergerak dan berubah sepanjang periode 2005 hingga 2025 di Indonesia. Pemahaman atas dinamika pergerakan variabel-variabel tersebut dari waktu ke waktu diharapkan dapat memberikan gambaran awal yang menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional dan sejauh mana stabilitas ekonomi berhasil dijaga selama periode tersebut.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji seberapa besar dan bagaimana arah pengaruh masing-masing indikator makroekonomi dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF), yaitu BI Rate, kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap inflasi di Indonesia secara sendiri-sendiri atau parsial selama periode 2005–2025. Melalui analisis ini diharapkan dapat teridentifikasi variabel mana yang memberikan kontribusi paling signifikan dalam memengaruhi pergerakan tingkat inflasi di Indonesia.
3. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh BI Rate, kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu kesatuan indikator makroekonomi dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) ketika bekerja secara bersamaan atau simultan terhadap inflasi di Indonesia periode 2005–2025. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana interaksi antarvariabel tersebut secara kolektif membentuk dinamika inflasi, sekaligus menjadi landasan yang

kuat bagi perumusan kebijakan moneter yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan indikator makroekonomi dan inflasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi *Inflation Targeting Framework* (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter dalam konteks perekonomian Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh indikator makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas harga.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa, terutama dalam bidang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, terkait hubungan antara indikator makroekonomi dan inflasi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian secara umum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait inflasi dan indikator makroekonomi.

5. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai kondisi perekonomian Indonesia, terutama yang berkaitan dengan indikator makroekonomi dan inflasi.

1.5 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh indikator makroekonomi dalam kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan inflasi selama periode penelitian serta mengkaji hubungan antara berbagai indikator makroekonomi dengan inflasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika inflasi beserta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam perekonomian nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan yang mencakup periode 2005 hingga 2025. Data tersebut diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Penggunaan data sekunder ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia selama periode penelitian.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh indikator makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia.

2. Variabel independen yang digunakan meliputi BI Rate (BI Rate), kurs rupiah, jumlah uang beredar, harga minyak mentah, pasar uang antar bank, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi sebagai variabel dependen.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2005 hingga 2025.
5. Penelitian ini difokuskan pada kondisi perekonomian Indonesia dan tidak mencakup faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian,